

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Angger Sigit Pramukti & Meylani Chahyaningsih. 2016. Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara. Yogyakarta; Penerbit Pustaka Yustisia.
- Aulia Sholichah Iman Nurchotimah, 2021, *Pengawasan Pelayanan Publik*, Jejak Pustaka, Hlm. 10.
- Fajlurrahman Jurdi, 2023, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Jakarta : Kencana.
- Hendra Nurtjahjo, yustus Maturbongs, Diani Indah Rachmitasari, 2013. Memahami Maladministrasi. Jakarta; Ombudsman Republik Indonesia.
- Irwansyah. 2020. Refleksi Hukum Indonesia. Yogyakarta; Mirra Buana Media.
- Irwansyah dan Ahsan Yunus. 2020. Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi). Yogyakarta; Birra Buana Media.
- Juniarso Ridwam dan Achmad Sodik Sudrajat. 2020. Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik. Bandung; Penerbit Nuansa Cendekia.
- Muhamad Mu'iz Raharjo dan Ick R.B, ed., 2021, Manajemen Pelayanan Publik, Jakarta: Bumi Aksara., Hlm. 5.
- Muhammad Syahrur. 2022. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, laporan Skripsi dan Tesis. Riau; BOTPLUS Publisher.
- Nurul Qamar, et. Al. 2017. Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods). Makassar; CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Sheyla Niclatus Sovia, et. Al. 2022. Ragam Metode Penelitian Hukum. Kediri; Lembaga Studi Hukum.
- Sirajuddin, Didik Sukriono, Winardi. 2012. Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan keterbukaan Informasi. Malang; Setara Press.
- Soerjono Soekanto, 2022, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Depok, Rajawali Pers
- Tiantono, Yuni Kurniasih. 2023. Dinamika Pengawasan Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Magelang; Penerbit Pustaka Rumah C1nta.
- Zainuddin Ali. 2009. Metode Penelitian Hukum. Jakarta; Sinar Grafika.

SKRIPSI :

A. Fauziyyah, 2023, Tinjauan Yuridis Kebijakan Pelaksanaan Pemerintah Terkait Impor Bawang Putih Terhadap Badan Urusan Logistik, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Ahmad Imam Santoso. 2019. *Pembuktian tidak langsung (Indirect Evidence) dalam Kasus Perjanjian Kartel Impor Bawang Putih (Analisis Putusan MA No.1495 K/Pdt.sus-KPPU/2017)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Natalia. 2019. *Evektifitas Penerapan Kebijakan Pemberian Kuota Impor Bawang Putih menurut Peraturan Menteri perdangan Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 di Kota Batam*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas International Batam.

JURNAL :

David Tan. 2021. metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. Volume 10 Nomor 8. Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Batam

Jamil Bazarah, Ahmad Jubaidi, dan Futum Hubaib. 2021. KONSEP PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA (Analisis Literasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia). Dedikasi. Volume 22 Nomor 2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Samarinda.

Manda Maulana, fauziah Kurniawati, Muhammad Khoirul Anwar, 2024, *Fokus Pengawasan Ombudsman RI: Evluasi Maladministrasi dalam pelayanan pubik di jakarta Raya*, Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Volume 5 Nomor 1, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta,

Nurdin, 2021, *Kekuatan Hukum Rekomendasi Ombudsman Sebagai Bentuk Pengawasan Terhadap Pelayanan Publik*, Jurnal Jatiswara, Volume 36 Nomor 2, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Ratna Ani Lestari dan S. Agus Santoso, 2022, Pelayanan Publik Dalam Good Governance, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 2 Nomor 1, Universitas Wijaya kusuma Surabaya dan Universitas Sebelas maret Surakarta, Surabaya dan Surakarta.

Regina Angelita Br Sebayang dan hartati, 2021, Peran Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik di Indonesia, Mendapo Journal o Administration Law, Volume 2 Nomor 2, Fakultas hukum universitas Jambi, jambi.

Reza Mochammad Yanuar. 2019. Inovasi pelayanan Publik (Studi Kasus: Public Safety Center (PSC) 119 Kabupaten Bantul Sebagai Layanan Kesehatan dan Kegawatdaruratan). Jurnal Ilmu Pemerintahan. Volume 4 Nomor 1. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Riska Chyntia Dewi dan Suparno, 2022, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Jurnal Media Administrasi, Volume 7 Nomor 1 Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik UNTAG Semarang, Semarang, Hlm. 84.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman republik Indonesia.

SUMBER INTERNET :

Ombudsman RI. (2023). Ombudsman RI Temukan Maladministrasi dalam Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) Bawang Putih diKementerianPerdagangan.Diaksesdari<https://ombudsman.go.id/artikel/r/ombudsman-ri-temukan-maladministrasi-dalam-pelayanan-penerbitan-surat-persetujuan-impor-spi-bawang-putih-di-kementerian-perdagangan>,pada minggu, 3 November 2023.

Ombudsman RI. (2024). Ombudsman sampaikan tindakan korektif untuk perbaikan layanan SPI di Kemendag. Diakses dari <https://ombudsman.go.id/artikel/r/ombudsman-ri-temukan-maladministrasi-dalam-pelayanan-penerbitan-surat-persetujuan-impor-spi-bawang-putih-di-kementerian-perdagangan>, pada Selasa 3 Desember 2024.

Ombudsman RI. (2021). Memahami Kapasitas Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik. Diakses dari <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--memahani-kapasitas-ombudsman-sebagai-lembaga-pengawas-pelayanan-publik>, pada Senin 3 Februari 2024.